

Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi

Farid Maulana Saragih¹, Muhammad Daffa Adhie Prasetya², Ahmad Wahyudi Zein³

¹Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May, 28 2025

Accepted May 30, 2025

Available online June 01, 2025

Keywords:

Fiscal justice, subsidy, redistribution, public policy

Kata Kunci:

Keadilan fiskal, subsidi, redistribusi, kebijakan publik



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Fiscal justice is an important principle in creating equality and social welfare in society. Through subsidy and redistribution policies, the government seeks to help disadvantaged and vulnerable groups in society. However, in practice, the distribution of benefits from subsidies is often uneven. This article aims to provide a simple understanding of the concept of fiscal justice and examine the actual conditions of subsidies and redistribution programs in Indonesia. This study uses a descriptive-qualitative approach with a literature study. The results show that fiscal policy in Indonesia still faces challenges in targeting accuracy and efficiency. Recommendations are given for policy reform so that fiscal justice can truly be realized.

ABSTRACT

Keadilan fiskal adalah prinsip penting dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Melalui kebijakan subsidi dan redistribusi, pemerintah berupaya membantu kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan. Namun dalam praktiknya, distribusi manfaat dari subsidi seringkali tidak merata. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman sederhana mengenai konsep keadilan fiskal dan menelaah kondisi aktual subsidi serta program redistribusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran dan efisiensi. Rekomendasi diberikan untuk reformasi kebijakan agar keadilan fiskal dapat benar-benar terwujud.

PENDAHULUAN

Keadilan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan elemen penting dalam pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan fiskal, khususnya lewat instrumen subsidi dan program redistribusi. Subsidi, seperti BBM, LPG 3 kg, dan listrik, pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Namun, kenyataannya subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas karena konsumsi energi mereka jauh lebih tinggi. Ini menyebabkan anggaran negara yang besar tidak tepat sasaran dan berpotensi memperbesar ketimpangan.

Sebagai solusi, pemerintah juga menjalankan program redistribusi seperti BLT, PKH, KIP, dan KIS untuk membantu kelompok rentan secara langsung. Sayangnya, program-program ini pun menghadapi masalah, terutama dalam hal pendataan dan ketepatan sasaran. Banyak kasus menunjukkan bahwa bantuan justru diterima oleh pihak yang tidak berhak, sementara yang benar-benar membutuhkan terlewatkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah kebijakan fiskal Indonesia sudah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan? Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis sederhana namun tajam terhadap efektivitas subsidi dan program redistribusi, agar tujuan keadilan fiskal benar-benar tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan subsidi dan redistribusi di Indonesia secara mendalam, tanpa menggunakan data primer. Sumber data berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta dokumen resmi seperti *APBN Kita*, laporan Bappenas, dan data dari BPS maupun lembaga internasional seperti World Bank dan IMF. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah konsep keadilan fiskal, mengevaluasi kondisi aktual di lapangan, serta menghubungkannya dengan teori ekonomi publik dan kebijakan sosial.

Tujuan metode ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana subsidi dan redistribusi dijalankan di Indonesia serta sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial.

*Corresponding author

E-mail: farid0501233200@uinsu.ac.id, daffa0501232058@uinsu.ac.id, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan Fiskal

Keadilan fiskal merupakan pondasi penting dalam sistem keuangan negara modern. Secara sederhana, keadilan fiskal berarti pembagian beban dan manfaat dari kebijakan pemerintah dilakukan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab, baik melalui pajak maupun belanja negara¹. Tujuan utamanya adalah agar setiap warga negara memperoleh hak dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Sebagai contoh, masyarakat kaya yang memiliki penghasilan besar dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi melalui sistem pajak progresif. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan berbagai bentuk bantuan atau pembebasan pajak². Dalam konteks ini, peran pemerintah bukan hanya sebagai penarik pajak, tetapi juga sebagai penyalur manfaat kepada mereka yang paling membutuhkan.

Ada dua prinsip penting yang menjadi pilar dari keadilan fiskal:

- Keadilan horizontal: Mereka yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan beban fiskal yang setara. Artinya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap dua orang dengan pendapatan yang sama hanya karena perbedaan profesi atau wilayah tempat tinggal.
- Keadilan vertikal: Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus berkontribusi lebih banyak kepada negara, baik melalui pajak yang lebih tinggi maupun pengurangan manfaat dari program subsidi³.

Lebih dari sekadar prinsip ekonomi, keadilan fiskal juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bernegara, bahwa negara harus hadir sebagai penyeimbang agar ketimpangan tidak semakin melebar⁴.

2. Jenis-Jenis Subsidi dan Dampaknya

Subsidi merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Di Indonesia, subsidi diberikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas harga barang pokok. Namun, implementasinya tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan fiskal.

a. Subsidi Langsung

Subsidi langsung disalurkan dalam bentuk uang tunai atau bantuan barang yang diberikan langsung kepada masyarakat tidak mampu. Bentuk subsidi ini dinilai lebih adil dan efisien, karena penerima manfaat sudah ditentukan secara jelas.

Contohnya:

- BLT (Bantuan Langsung Tunai) diberikan kepada keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama saat terjadi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19⁵.
- PKH (Program Keluarga Harapan) memberikan bantuan rutin kepada keluarga dengan anak sekolah, lansia, atau ibu hamil, dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Subsidi langsung juga memiliki efek ganda: tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga mendorong partisipasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan. Namun demikian, ketepatan data penerima tetap menjadi tantangan utama. Masih banyak keluarga tidak mampu yang tidak terdata, sementara yang seharusnya tidak layak justru menerima bantuan⁶.

b. Subsidi Tidak Langsung

Subsidi tidak langsung diberikan dalam bentuk pengurangan harga barang atau jasa. Contohnya:

- Subsidi BBM, yang membuat harga bensin dan solar lebih murah dari harga pasar.
- Subsidi LPG 3 kg, yang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.
- Subsidi listrik, terutama untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450–900 VA

Masalah terbesar dari subsidi ini adalah bocor ke kelompok masyarakat mampu. Misalnya, pemilik kendaraan pribadi dengan mobilitas tinggi justru menerima lebih banyak manfaat dari subsidi BBM daripada pengguna sepeda motor atau transportasi umum. Selain itu, dalam praktiknya, subsidi LPG 3 kg seringkali digunakan oleh pelaku usaha menengah ke atas, seperti warung makan dan usaha catering. Hal ini menyebabkan alokasi subsidi menjadi tidak adil dan anggaran negara menjadi tidak efisien.

Subsidi tidak langsung cenderung bersifat konsumtif dan tidak berdampak jangka panjang. Maka, banyak ahli menyarankan agar subsidi jenis ini dikurangi secara bertahap dan dialihkan ke bentuk subsidi langsung atau investasi jangka panjang seperti pendidikan dan pelatihan kerja².

3. Program Redistribusi

Redistribusi merupakan salah satu **fungsi utama negara modern** dalam menjamin kesejahteraan sosial dan menekan ketimpangan ekonomi. Secara umum, redistribusi adalah proses pemindahan sebagian sumber daya ekonomi dari kelompok masyarakat kaya ke kelompok tidak mampu melalui instrumen fiskal seperti **pajak**

¹ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*

² Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*.

³ Stiglitz, J. E. (1988). *Economics of the Public Sector*.

⁴ Kadir, M. A. (2021). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Fiskal*.

⁵ Santosa, H. (2021). Evaluasi Program BLT dan Dampaknya. *Jurnal Pembangunan Sosial*.

⁶ Nugroho, D. (2020). *Digitalisasi dan Efektivitas Bantuan Sosial*.

progresif dan program bantuan sosial⁷. Ini merupakan perwujudan dari kehadiran negara sebagai pelindung kelompok rentan, sekaligus sebagai penyeimbang dalam sistem kapitalisme yang cenderung menciptakan jurang sosial yang lebar jika dibiarkan tanpa intervensi.

Redistribusi tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral negara terhadap warga yang tidak mampu, tetapi juga merupakan strategi penting untuk **menciptakan stabilitas sosial dan politik**. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi, maka kepercayaan terhadap negara dan institusi publik bisa runtuh.

Jenis Program Redistribusi di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai program redistribusi yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Di antaranya adalah:

- **Kartu Indonesia Pintar (KIP)**: Bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya pendidikan. Program ini mencakup bantuan tunai rutin untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, dan perlengkapan belajar.
- **Kartu Indonesia Sehat (KIS)**: Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu secara gratis melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini sangat penting dalam memastikan bahwa **akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya milik orang kaya**, tetapi juga hak bagi setiap warga negara.
- **Program Makan Gratis**: Merupakan program baru yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan meningkatkan **asupan gizi anak sekolah**, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program ini berpotensi menjadi pendorong keberhasilan pendidikan karena anak yang cukup gizi cenderung lebih fokus dan aktif di sekolah.
- **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**: Memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga yang tidak mampu melalui sistem elektronik. Program ini memungkinkan penerima untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lain di e-warung dengan harga yang ditentukan pemerintah.

Program-program tersebut tidak hanya memberikan **bantuan materiil**, tetapi juga berfungsi sebagai **sinyal bahwa negara hadir** dan peduli terhadap kelompok marjinal. Mereka berperan dalam meningkatkan **daya beli, kualitas hidup, dan partisipasi sosial** masyarakat yang tidak mampu.

Tantangan Utama: Ketepatan Sasaran.

Meskipun program redistribusi ini memiliki tujuan yang sangat baik, **pelaksanaannya masih jauh dari sempurna**. Salah satu masalah terbesar yang terus berulang adalah **ketidaktepatan sasaran penerima manfaat**. Banyak laporan dan temuan lapangan menunjukkan bahwa:

- Bantuan sering kali diterima oleh keluarga yang **tidak miskin**, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam daftar penerima⁸.
- Pendataan penerima masih **mengandalkan data lama** yang tidak diperbarui secara berkala.
- Dalam beberapa kasus, **intervensi politik dan nepotisme** membuat bantuan dialihkan kepada kelompok pendukung atau kerabat pejabat lokal.
- Kurangnya **pengawasan dan evaluasi berbasis data** membuat perbaikan program berjalan lambat.

Menurut laporan dari Bappenas, sekitar **30–40% program bantuan sosial di Indonesia masih mengalami kebocoran data penerima**, yang artinya dana negara yang seharusnya menyasar masyarakat tidak mampu justru jatuh ke tangan yang salah⁹. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan penerima manfaat yang sebenarnya, tapi juga **menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kredibilitas pemerintah**.

Dampak Positif yang Terbukti

Meskipun banyak tantangan, beberapa studi menunjukkan bahwa program redistribusi seperti PKH dan KIS telah **berhasil menurunkan angka kemiskinan** dan meningkatkan kualitas hidup kelompok yang tidak mampu secara signifikan¹⁰. Misalnya, anak-anak dari keluarga penerima KIP memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menyelesaikan pendidikan dasar, dan peserta KIS cenderung lebih cepat mengakses layanan medis saat sakit.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika data diperbaiki, dan sistem pengawasan ditingkatkan, **program redistribusi benar-benar mampu menjadi alat yang ampuh** dalam menciptakan keadilan sosial dan fiskal.

Langkah Perbaikan

Untuk meningkatkan keberhasilan program redistribusi, beberapa langkah penting perlu dilakukan:

1. **Pembaruan dan validasi data penerima secara berkala** melalui integrasi antara DTKS, NIK, dan sistem digital lainnya.
2. **Pelibata masyarakat dalam proses pengawasan**, misalnya dengan membuka akses publik terhadap daftar penerima bantuan untuk mendorong transparansi.

⁷ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*.

⁸ Sakernas BPS. (2023). *Laporan Statistik Sosial dan Kemiskinan*.

⁹ Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial*.

¹⁰ World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Social Protection Overview*.

3. **Penggunaan teknologi**, seperti data geospasial dan algoritma penyaringan, untuk menentukan tingkat kebutuhan rumah tangga berdasarkan data konsumsi, lokasi, dan akses terhadap layanan publik.
4. **Desentralisasi kebijakan**, dengan tetap menjaga standar nasional, agar program redistribusi bisa disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Dengan perbaikan sistemik dan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat tidak mampu, **program redistribusi bisa menjadi jembatan nyata menuju keadilan fiskal yang sesungguhnya.**

4. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Evaluasi merupakan aspek krusial dalam siklus kebijakan publik, termasuk dalam konteks subsidi dan program redistribusi. Evaluasi tidak hanya sekadar mengukur dampak, tetapi juga digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan benar-benar berjalan sesuai tujuan awal dan apakah sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal.

Secara umum, evaluasi mencakup dua indikator utama:

Efektivitas: Menjawab pertanyaan apakah program tersebut benar-benar mencapai sasaran. Misalnya, apakah bantuan sosial menurunkan tingkat kemiskinan? Apakah subsidi pendidikan meningkatkan angka partisipasi sekolah?

Efisiensi: Menilai apakah dana publik yang digunakan menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin, serta meminimalkan kebocoran atau pemborosan anggaran¹¹

Sayangnya, di Indonesia, masih banyak program subsidi dan redistribusi yang gagal memenuhi kedua indikator ini. Beberapa contoh nyata antara lain:

- Subsidi LPG 3 kg masih banyak digunakan oleh pelaku usaha dan rumah tangga mampu, bukan oleh masyarakat tidak mampu yang menjadi sasaran utamanya. Hal ini disebabkan oleh distribusi terbuka dan minim pengawasan¹².
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) seringkali diterima oleh masyarakat yang sudah tidak tergolong miskin, karena data penerima tidak diperbarui secara berkala. Sementara itu, banyak keluarga tidak mampu yang tidak terdata justru tidak mendapatkan bantuan.
- Program bantuan tumpang tindih, di mana satu rumah tangga bisa menerima berbagai jenis bantuan seperti BLT, PKH, BPNT, dan subsidi lainnya secara bersamaan, sementara rumah tangga lain yang lebih membutuhkan tidak menerima apa-apa karena terlewat dalam pendataan¹³.

Lebih lanjut, minimnya evaluasi berkala menyebabkan program-program tersebut tetap berjalan meskipun tidak lagi relevan atau efektif. Hal ini berdampak pada pemborosan anggaran negara, rendahnya daya guna kebijakan fiskal, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Idealnya, setiap program subsidi dan redistribusi harus memiliki mekanisme evaluasi kinerja yang jelas, meliputi indikator keberhasilan, waktu evaluasi, serta sistem pelaporan yang transparan. Dengan begitu, program yang tidak efektif bisa dihentikan atau direvisi, dan anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih prioritas.

5. Tantangan dan Solusi

Tantangan:

Mewujudkan keadilan fiskal melalui subsidi dan redistribusi di Indonesia tidaklah mudah. Berbagai tantangan terus menghambat keberhasilan program-program sosial yang ada. Beberapa tantangan utama yang sering terjadi di lapangan antara lain:

1. Subsidi sebagai alat politik. Banyak kebijakan subsidi dibuat menjelang pemilihan umum atau untuk menjaga citra politik, bukan berdasarkan hasil kajian kebijakan yang objektif. Akibatnya, program yang diluncurkan seringkali tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebenarnya.
2. Keterbatasan anggaran negara. Dengan APBN yang harus membiayai berbagai sektor, dari pendidikan hingga infrastruktur, pemerintah harus selektif dalam alokasi dana. Namun, ketika subsidi diberikan secara luas tanpa target yang jelas, hal ini bisa membebani anggaran dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor prioritas lainnya¹⁴.
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam banyak kasus, penyaluran bantuan tidak disertai laporan publik yang bisa diakses masyarakat. Hal ini membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama di tingkat daerah.

Solusi

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas, diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola program subsidi dan redistribusi. Beberapa solusi strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Perbaikan dan integrasi data sosial nasional. Sistem data seperti DTKS harus diperbarui secara berkala dan terintegrasi dengan NIK, data kependudukan, dan data kepemilikan aset dari kementerian/lembaga terkait. Pendataan berbasis teknologi seperti geo-tagging dan survei digital dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi data.

¹¹ Stiglitz, J. E. (1988). *Economics of the Public Sector*.

¹² Fitriani, D. (2022). *Ketepatan Sasaran Subsidi LPG 3 Kg*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Energi*.

¹³ Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial*.

¹⁴ Sakernas BPS. (2023). *Laporan Statistik Sosial dan Kemiskinan*.

2. Digitalisasi sistem penyaluran. Bantuan sosial sebaiknya disalurkan secara digital melalui rekening bank, e-wallet, atau aplikasi yang terhubung langsung ke sistem nasional. Selain mempercepat distribusi, cara ini juga meningkatkan akuntabilitas.
3. Penggunaan teknologi dalam targeting. Artificial intelligence (AI), big data, dan machine learning dapat digunakan untuk menyaring penerima yang paling membutuhkan. Misalnya, rumah tangga dengan konsumsi listrik rendah, kepemilikan kendaraan, dan lokasi geografis terpencil bisa diutamakan dalam pemberian bantuan.
4. Edukasi publik tentang peran subsidi. Pemerintah perlu menyosialisasikan bahwa subsidi adalah hak bersyarat, bukan hak mutlak. Hanya mereka yang benar-benar tidak mampu dan rentan yang berhak mendapat subsidi, bukan semua warga tanpa pembeda.
5. Pengalihan subsidi konsumtif ke produktif. Alih-alih menghabiskan anggaran untuk subsidi BBM yang dinikmati semua kalangan, dana tersebut bisa dialihkan ke pelatihan kerja, pembiayaan UMKM, atau bantuan modal usaha bagi petani dan nelayan.
6. Transparansi dan pelibatan masyarakat. Pemerintah harus membuka data penerima bantuan kepada publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Partisipasi publik dalam pengawasan akan mempersempit ruang penyalahgunaan anggaran.

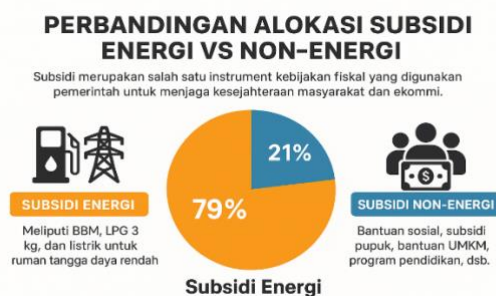
Dengan implementasi solusi-solusi di atas secara konsisten dan terencana, maka keadilan fiskal bukan hanya menjadi konsep ideal, melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat tidak mampu di seluruh penjuru Indonesia.

6. Perbandingan Alokasi Subsidi Energi vs Non-Energi

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, subsidi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, dalam pelaksanaannya, porsi dan dampaknya menunjukkan ketimpangan yang perlu menjadi perhatian¹⁵.

Subsidi energi meliputi bantuan pemerintah untuk menekan harga jual energi di bawah harga pasar. Bentuknya mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, dan subsidi listrik bagi rumah tangga dengan daya rendah (450 VA dan 900 VA). Subsidi ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga global. Namun, dalam praktiknya, subsidi energi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang memiliki konsumsi energi tinggi. Misalnya, pemilik kendaraan pribadi dengan mobilitas tinggi lebih banyak menyerap subsidi BBM dari pada masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki kendaraan bermotor.

Sebaliknya, subsidi non-energi mencakup bantuan sosial dan dukungan sektor produktif. Bentuknya antara lain subsidi pupuk bagi petani, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan dukungan kepada UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)¹⁶. Subsidi jenis ini lebih bersifat jangka panjang dan produktif karena mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, serta memberdayakan kelompok ekonomi lemah.



Gambar (Infografik Perbandingan Alokasi Subsidi Energi vs Non Energi)

Jika dilihat dari sisi anggaran, terdapat ketimpangan signifikan antara subsidi energi dan non-energi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp 339 triliun, atau sekitar 79% dari total anggaran subsidi. Sementara itu, subsidi non-energi hanya memperoleh Rp 90 triliun atau sekitar 21% dari total¹⁷. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi masih diarahkan pada sektor konsumtif yang rentan tidak tepat sasaran.

¹⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan dan RAPBN 2023*.

¹⁶ Bappenas. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial Tahun 2021*.

¹⁷ Kementerian Keuangan. (2023). *APBN Kita – Edisi Desember 2023*.

Padahal, alokasi subsidi yang lebih besar ke sektor non-energi memiliki potensi memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Subsidi pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang tidak mampu untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri. Dengan demikian, reformasi alokasi subsidi menjadi hal penting agar keadilan fiskal benar-benar terwujud dan kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pembangunan jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dalam merealokasi sebagian subsidi energi ke subsidi non-energi. Selain memperkuat keadilan sosial, langkah ini juga akan meningkatkan efisiensi anggaran negara. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip keadilan vertikal, yakni kelompok mampu tidak lagi menikmati subsidi berlebih, sementara subsidi diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berdampak luas bagi pembangunan¹⁸.

SIMPULAN

Keadilan fiskal merupakan prinsip krusial dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Melalui instrumen subsidi dan program redistribusi, pemerintah berupaya membantu kelompok rentan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, data penerima yang tidak akurat, dan dominasi subsidi konsumtif seperti energi yang justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu.

Subsidi langsung dan program redistribusi seperti PKH, KIP, dan KIS terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan bila dijalankan secara tepat sasaran. Sebaliknya, subsidi tidak langsung seperti BBM dan LPG 3 kg seringkali tidak efektif dan membebani anggaran negara. Evaluasi menunjukkan masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kebijakan fiskal, serta tingginya kebocoran bantuan sosial.

Untuk mewujudkan keadilan fiskal yang nyata, perlu dilakukan reformasi menyeluruh melalui perbaikan data, digitalisasi sistem penyaluran, realokasi anggaran subsidi energi ke sektor produktif, dan peningkatan transparansi serta partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, subsidi dan redistribusi dapat menjadi instrumen yang adil, efisien, dan berkelanjutan dalam menyejahterakan masyarakat tidak mampu.

REFERENSI

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*.
 Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*.
 Stiglitz, J. E. (1988). *Economics of the Public Sector*.
 Kadir, M. A. (2021). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Fiskal*.
 Santosa, H. (2021). Evaluasi Program BLT dan Dampaknya. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
 Nugroho, D. (2020). *Digitalisasi dan Efektivitas Bantuan Sosial*.
 Sakernas BPS. (2023). *Laporan Statistik Sosial dan Kemiskinan*.
 Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial*.
 World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Social Protection Overview*.
 Fitriani, D. (2022). Ketepatan Sasaran Subsidi LPG 3 Kg. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Energi*.
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan dan RAPBN 2023*.
 Bappenas. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial Tahun 2021*.
 Kementerian Keuangan. (2023). *APBN Kita – Edisi Desember 2023*.
 Nurkholis, M. (2021). *Subsidi dan Keadilan Fiskal di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Publik*, 6(2), 115–130.

¹⁸ Nurkholis, M. (2021). *Subsidi dan Keadilan Fiskal di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Publik*, 6(2), 115–130.